

MEMAHAMI POTENSI EKONOMI, IKLIM INVESTASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI JAWA TIMUR

Oleh:

Didin Fatihudin

FE-Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail : dfatihudin@yahoo.co.id

ABSTRACT

One of the goals of economic development is economic growth. Potential local economy, innovation and investment climate can affect local economic growth. East Java Province has 38 districts / cities have a chance at better economic growth. Economic development, economic growth plus the change (change), changes in per capita income residents, public health, and public education. Otda Act can be used as a basis for stimulating local economic development in East Java. The results KPPOD, USAID & AF (2007) the investment climate must be created and the desired investor / entrepreneur; the simplification and licensing system, reduction of charges that overlap, transparency of licensing fees, legal certainty and security and availability of infrastructure. The investor and the government of East Java can work together in economic development towards the welfare of society.

Keyword: economic potential, investment climate, economic growth, economic development.

1. Potensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi

Mengenali potensi ekonomi suatu daerah itu tidak mudah. Seperti mudahnya membalikkan tangan. Apalagi mengenali potensi ekonomi 38 kabupaten/kota se Provinsi di Jawa Timur. Potensi itu meliputi luas geografi, kesuburan tanah, air bersih, perubahan iklim, kuantitas/kualitas tenaga kerja, keadaan infrastruktur, jalan, jembatan, bendungan, pabrik, pelabuhan, bandara, keindahan alam, sumberdaya alam gas, minyak, nikel, emas, tembaga, logam dan lainnya. Tentu yang paling mengenali potensi itu adalah para elit politik daerah, para kepala daerah, masyarakat, para pengambil kebijakan lainnya di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan tercapai jika daerah mampu *memahami, menggali dan mengelola* potensi ekonomi di daerah. Begitu pula sama pentingnya memahami perbedaan antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Apa bedanya itu. Kalau *pertumbuhan ekonomi* diukur oleh seberapa besar produktivitas suatu daerah mampu menghasilkan barang (*goods*) dan jasa (*services*) dalam tahun tertentu. Sedangkan pembangunan ekonomi pengertiannya lebih luas dan terintegrasi. *Pembangunan ekonomi* adalah pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan (*change*). Pembangunan itu menuntut ada perubahan-perubahan lain selain barang dan jasa yakni harus ada perubahan peningkatan *pendapatan perkapita* penduduk, *kesehatan* masyarakat, dan *pendidikan* masyarakat.

Sebagaimana Kuznet, HB.Chenery, Abipraja, Baldwin & Meier menyatakan bahwa pembangunan ekonomi bisa menyebabkan perubahan struktur ekonomi,

*Balance Economics, Business, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008.
Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352*

bertambahnya pendapatan nasional, tingkat pendidikan penduduk semakin baik dan teknologi semakin tinggi, dan lapangan pekerjaan semakin terbuka. Bahkan menurut JM.Keynes campur tangan pemerintah (*government*) dan keterlibatan swasta (*private*) sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya kurang bijak jika provinsi Jawa Timur hanya diukur oleh pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi lebih sempurna jika diamati juga dari ketiga hal tersebut dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tingkat kemakmuran/kesejahteraan masyarakat (*welfare*) suatu daerah, tidak hanya dapat diukur oleh *faktor ekonomi* saja akan tetapi juga *faktor non ekonomi* juga penting. seperti norma etika/kebiasaan kedaerahan, cara pandang dan perilaku masyarakatnya, kelembagaan, keamanan, kepastian hukum dan kecepatan pelayanan dari aparat terhadap masyarakat. Memang masih menjadi bahan diskusi diantara kita mana yang lebih dulu penyebab utama kesejahteraan masyarakat ; ekonomikah atau non ekonomikah atau bersamaan. Seperti telur dengan ayam. Telur dulu atau ayam dulu. Entahlah, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita dapat membenahi kedua faktor tersebut ke depan. Jangan sampai salah urus, salah kelola, sehingga membebani semua pihak. Potensi ekonomi Jawa Timur menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita ke depan.

Penulis tertarik mengutip hasil survey pada APBD 372 kab/kota pada 50 kabupaten/kota "terkaya" di Indonesia, versi Warta Ekonomi (No.17/Th.XVI tanggal 25 Agustus 2004) dilihat dari rasio pendapatan daerah yang terdiri dari PAD,DAU,DAK, bagi hasil terhadap jumlah penduduk. Ditulis disitu bahwa dari 50 kab/kota yang terjaring di Indonesia, dari Provinsi Jawa Timur "hanya" ada 8 kab/kota saja dari 38 kab/kota (29 kab dan 9 kota) yang termasuk "terkaya", yakni Kota Surabaya urutan kelima, Kota Malang urutan ke tigabelas, Kabupaten Jember urutan ke empatbelas, Kab.Sidoarjo keduapuluhtiga, Kabupaten Banyuwangi kedua puluh lima, Kabupaten Pasuruan keduapuluh tujuh, Kediri ketigapuluh tujuh, dan Kabupaten Jombang urutan keempatpuluhlima. Menurut penulis mestinya lebih banyak dari itu. Tapi masih bisa dikatakan masih lebih baik jika dibandingkan provinsi lain. Sepuluh sampai 25 tahun ke depan diharapkan Kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur dapat lebih banyak lagi termasuk 'daerah kaya' dan mendominasi daerah provinsi lainnya di Indonesia.

Tapi kadang lupa bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menunjukkan disparitas pendapatan secara merata bagi seluruh masyarakat. *Pendapatan per kapita* itu adalah hasil bagi dari total pertumbuhan ekonomi dibagi jumlah total penduduk di daerah yang bersangkutan. Dipukul rata. Dari mulai direktur, gubernur, aparatur sampai tukang cukur sekalipun pendapatannya disamaratakan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bisa saja pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Para direktur saja, bahkan tukang cukur dilupakan. Ada satu hal lagi pelajaran berharga, yakni bagaimana caranya pemerataan pendapatan. Ini yang sulit. Karena semua pihak sarat dengan kepentingan. *Distribusi pendapatan* bagi masyarakat itu penting. Keberpihakan pemerintah daerah *diuji* disini. Kemakmuran bagi sekelompok orang, perorangan atau orang banyak (sebut rakyat). Disinilah letaknya bagaimana pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengalokasikan, distribusi dan stabilisasi ekonomi di daerah. Keberpihakannya harus jelas, seperti yang dipromosikan pak Gubernur terpilih ; APBD untuk rakyat! Maksudnya *Belanjanya* diutamakan untuk

kepentingan/kesejahteraan rakyat Jawa Timur, tetapi *pajaknya* tetap ringan, proporsional tidak membebani rakyat. Apalagi membebani para investor. *Sunset policy* misalnya itu bagus dan dapat diteruskan tergantung responsi para pengusaha Jawa Timur.

Mari kita melihat tingkat kekayaan/kemiskinan kab/kota Jawa Timur dapat diamati dari potensi ekonomi daerah secara keseluruhan tercermin dari besarnya PDRB (*product domestik regional bruto*). PDRB ini menggambarkan produktivitas kab/kota di Jawa Timur dalam menghasilkan barang dan jasa dalam tahun tertentu. Disamping itu juga bisa diketahui dari *seberapa besar penerimaan daerah (income)* atau *besarnya pengeluaran daerah atau belanja pembangunan (expenditure)* di berbagai lapangan usaha atau sektor. Lebih baik lagi kalau ditambah melihat dari *kontribusi sektor*. Sektor mana yang kontribusi yang paling besar atau paling kecil terhadap PDRB Jawa Timur. Jika sudah diketahui hal tersebut, alangkah mudahnya para pengambil kebijakan dalam menentukan alokasi anggaran/APBD Jawa Timur ke depan. Sektor mana yang harus ditingkatkan besaran rupiahnya dan sektor mana yang bisa dipangkas dikurangi. Optimalisasi anggaran APBD akan tercapai. Jurang target dengan realisasi bisa dipersempit.

Sebagai bahan analisis secara empiris di bawah ini akan dikemukakan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, perbandingan kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap PDRB Indonesia serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menurut lapangan usaha dan Realisasi pendapatan Jawa Timur dari mulai Tahun 2002 hingga 2006.

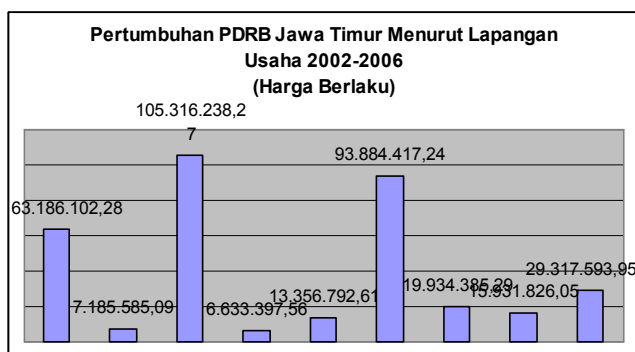
Gambar 1



Sumber : BPS Jawa Timur (2002-2006)

Perbandingan PDRB Jawa Timur dan Indonesia atas dasar harga yang berlaku dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dalam jutaan rupiah, menunjukkan bahwa PDRB Jawa Timur memberikan kontribusi rata-rata sebesar 13 persen setiap tahun atau sebesar 356.570.534 triliun rupiah kepada PDRB Indonesia sebesar 87% atau sebesar 2.368.556,440 triliun rupiah dari 35 Propinsi di Indonesia. Ini cukup membanggakan bagi warga Jawa Timur bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa timur Telah mampu menyumbang terhadap PDRB Indonesia sebesar 13 persen. Ini cukup besar dibanding lainnya.

Gambar 2



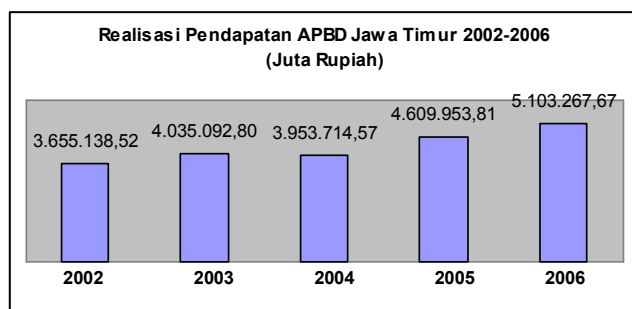
Sumber : BPS Jawa Timur (200-2006)

Keterangan :

- 1.pertanian ; 2 pertambangan dan penggalian ;3 industri manufaktur ;
- 4.Listrik,Gas,dan Air minum ; 5 Bangunan ; 6 Perdagangan, Hotel dan restoran ; 7
- Pengangkutan dan Komunikasi ; 8 Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan ; 9
- Jasa-jasa.

Pertumbuhan rata-rata PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha atau sektor atas dasar harga yang berlaku dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dalam juta rupiah, menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Jawa Timur tertinggi pada sektor industri manufaktur, diikuti perdagangan dan pertanian. Sedangkan pertumbuhan PDRB yang paling rendah pada sektor Listrik, gas dan air minum, diikuti sektor pertambangan dan penggalian serta sektor Bangunan. Dengan data ini pemerintah Jawa Timur sudah bisa melihat dan menarik kesimpulan bahwa yang harus ditingkatkan adalah sektor penambangan dan penggalian, Listrik, Gas dan Air minum, sektor bangunan dan sektor keuangan dan jasa perusahaan. Mengenai letaknya dimana, ini perlu pengkajian kembali secara menyeluruh disetiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Gambar 3



Sumber : Biro Keuangan, Kantor Gubernur Jawa Timur (2002-2006)

Jika kita amati gambar 3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 dalam Jutaan rupiah, menunjukkan bahwa Realisasi pendapatan APBD Jawa Timur *trend*-nya relatif meningkat terutama pada tahun 2005 dan 2006. Paling tinggi yakni pada tahun 2006 sebesar 6.103.267,67 triliun, sedangkan terendah pada tahun 2002 sebesar 3.655.138,52 triliun. Kalau tahun 2002 kenapa masih rendah, mungkin pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur baru akan melaksanakan UU Otda yang baru diberlakukan satu tahun kemudian yakni tahun 2001 atau masa transisi dari pola lama ke pola baru. Kalau tahun 2006 tinggi ini menunjukkan bahwa pmda sudah siap dengan aturan yang baru.

2. Gairah Otonomi Daerah, Peran Pemerintah Daerah dan Iklim Investasi

Semangat Undang-undang otonomi daerah Nomor 32 dan nomor 33/2004 tentang Pemerintah daerah dan Perimbangan keuangan pusat dan daerah diharapkan kabupaten/kota di Jawa Timur dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Tetapi dengan catatan gairah peningkatan PAD tidak boleh memberatkan para investor datang ke daerah. Pembuatan Perda-perda di daerah harus cermat, jangan tumpang tindih dan *double* pungutan, sehingga memberatkan masyarakat. Seperti hasil survey Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD,2007) dinyatakan bahwa iklim investasi yang harus tercipta dan dikehendaki oleh investor/pengusaha adalah ; (1) penyederhanaan sistem dan perijinan (2) penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, (3) transparansi biaya perijinan (4) kepastian hukum dan keamanan serta (5) infrastruktur (KKPOD,USAID&AF,2004,2007). Sudah hampir sembilan tahun undang-undang otonomi daerah dijalankan ; sejak januari 2001 hingga kini 2009. Bagaimana caranya, kenalilah *potensi ekonomi* dan *sumberdaya* di daerahnya. Tentu dengan memacu realisasi pertumbuhan ekonomi diberbagai lapangan usaha dan pembangunan ekonomi Jawa Timur yang terus menerus, lebih giat dan optimal.

Sebaiknya minimal setiap lima tahun ada pemetaan (*mapping*) kembali keunggulan di tiap-tiap kabupaten atau kota. Pertemuan rutin atau dialog rutin antara aparat di kabupaten/kota dengan para investor. Investasi diyakini dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Daerah mana saja yang pantas dikembangkan.

Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008.
Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352

Mana yang tidak. Mana sentra industri manufaktur, mana sentra perkebunan, sentra peternakan, sentra perikanan, pariwisata, budaya dan sumberdaya alam lain yang dapat digali, diekspolarasi dan dieksploitasi seperti tambang minyak blok Cepu di Bojonegoro misalnya. Memang kadang industri sangat sarat dengan padat modal dan padat teknologi yang mengakibatkan sangat sedikit pada penyerapan tenaga kerja.

Pernyataan Asshiddiqi,(2000) sampai saat ini masih relevan untuk diaplikasikan di daerah, bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh aparatur pemerintah di pusat, akan tetapi juga sangat tergantung pada keprakarsaan, kreativitas, kemandirian, dan kesungguhan aparatatur daerah itu sendiri. Bagaimana aparatur dan masyarakatnya untuk memberi arti dan meningkatkan kualitas kemandirian daerah itu sendiri. Otonomi daerah harus diimbangi oleh partisipasi aktif dari pelaku ekonomi dan masyarakat lokal. Karena keterbatasan sumberdaya (*resources*) partisipasi dari bawah itu perlu sumber pendukung dari luar, misalnya para investor yang datang dari luar daerah. Bantuan bisa berupa ; (1) kebutuhan modal berupa pinjaman (kredit), ; (2) keterampilan teknis dan penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah produksi (*value added*) para pelaku ekonomi di daerah, ; (3) tenaga terampil dan SDM berkualitas ; (4) mobilisasi tenaga ahli pendamping ; (5) akses informasi dan sistem jaringan informasi yang luas. Akses informasi yang luas, baik yang berkaitan dengan akses pasar, akses modal, akses teknologi, akses sumber-sumber bahan baku produksi. Memobilisasi tenaga ahli ke daerah itu sangat penting dengan membangun jaringan informasi penunjang. Diharapkan dengan otonomi daerah dan investasi bisa menumbuhkan produktivitas ekonomi di daerah.

Ada *tiga elemen penting* penentu dalam *berinvestasi*, yakni ; (1) hasil (*revenue*), (2) biaya (*cost*), dan (3) ekspektasi (*expectation*)(*Samuelson,2004*). *Penentu pertama*, Investasi akan memberikan kepada pemerintah daerah *hasil tambahan* jika investasi dapat membantu pemerintah daerah lebih banyak menghasilkan produk. Ini mengisyaratkan bahwa keseluruhan *output* (atau GDP) akan merupakan penentu penting dari investasi. Investasi di daerah akan bergantung pada *revenue* yang akan dihasilkan oleh aktivitas ekonomi daerah secara keseluruhan. *Penentu kedua* dari investasi itu adalah *biaya berinvestasi*. Para investor seringkali mengumpulkan dana untuk membeli barang-barang modal dengan cara meminjam. Biaya pinjaman ini biasanya berupa suku bunga. Suku bunga (*interest*) merupakan harga yang dibayar untuk meminjam uang untuk suatu periode waktu tertentu. Pajak (*Tax*) juga berpengaruh penting terhadap investasi. Jika suku bunga pinjaman dan tarif pajak diturunkan, maka respon dari para investor akan ramai-ramai meningkatkan investasinya di berbagai sektor sesuai yang diinginkan pemerintah daerah. Sebaliknya jika tarif pajak dan suku bunga meningkat, maka para investor akan mengurangi di sektor riil yang selanjutnya mungkin akan mengalihkan dananya ke sektor finansial.

Lain halnya kalau mengamati kinerja keuangan Pemda tentang selisih pendapatan dengan Belanja Daerah. Dalam APBD. Jawabannya dua defisit atau surplus. Mengapa surplus dan mengapa menjadi defisit. Jawabannya pada kita semua. Defisit tersebut bisa saja merupakan pertanda salah urus (*mis-management*) dan *inefisiensi* penggunaan keuangan daerah. Dari *sisi penerimaan*,

kalau terjadi defisit, salah urus dan inefisiensi ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah menggali sumber-sumber pendapatan di daerahnya. Sedangkan dari *sisi pengeluaran*, hal itu disebabkan antara lain oleh proteksi berlebihan upaya nasionalisasi perekonomian Jawa Timur dan pembiayaan yang melebihi kemampuan atas proyek-proyek investasi yang telah dicanangkan pemerintah daerah di masa lalu. Sebagai contoh yang masih hangat di benak kita *Jembatan Suramadu*, infrastruktur yang menghubungkan Surabaya-Madura yang diresmikan pada bulan Juni. Menghabiskan *cost* yang cukup besar. Seberapa besar jembatan Suramadu tersebut memiliki pengaruh terhadap tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat 4 kabupaten di Pulau Madura, dan seberapa besar mampu mendongkrak peningkatan PAD/APBD Jawa Timur.

Sebenarnya masih banyak faktor lain yang perlu dikaji dalam menggali potensi ekonomi daerah ini, akan tetapi kita semua itu dibatasi oleh sudut pandang masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah ada, tidak adanya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Jawa Timur ini tergantung pada *kemauan* dan *kemampuan* aparat pemerintah daerah, para investor dan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Timur dalam menyikapi regulasi UU Otonomi daerah yang sudah bergulir hampir sembilan tahun itu. Bagi kabupaten/kota yang sudah berhasil meningkatkan PADnya diucapkan selamat dan sukses, dan bagi yang PADnya belum meningkat, teruskan bekerja keras, berjuang, lebih cepat lebih baik, dan lanjutkan !

Daftar Pustaka

- Asshiddiqi, (2000), *Otonomi daerah dan Peluang Investasi*, Makalah Seminar *Government Conference*, di Jakarta.
- BPS, Jawa Timur Dalam Angka 2007
- Jhingan.,M.L. (2007), *The Economics of Development and Planning*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- KPPOD (2001) *Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota ; Studi Kasus 90 Kab/Kota ; di 68 Kabupaten, 22 Kota dari 24 Propinsi di Indonesia*. Jakarta : Hasil Penelitian
- KPPOD, USAID dan The Asia Foundation, (2004) *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Persepsi Dunia Usaha, KPPOD Jakarta, Hasil Penelitian*.
- KPPOD, USAID dan The Asia Foundation, (2007) *Survey tentang Daya Tarik Investasi Daerah pada Pelaku Usaha dari 243 Kabupaten/Kota di 15 Provinsi di Indonesia*, Jakarta, Hasil Penelitian.
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*, Bandung, Penerbit Citra Umbara.
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Bandung, Penerbit Citra Umbara.
- Samuelson (2004) *Macroeconomics*, edisi ketujuh belas, Jakarta, PT Media Global Edukasi.
- Warta Ekonomi No.17/Th.XVI tanggal 25 Agustus 2004